

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor kepariwisataan adalah salah satu sektor menyumbang devisa terbesar bagi Negara Indonesia. Dewasa ini upaya pengembangan pariwisata di Indonesia terus dilakukan mulai dari akses menuju destinasi/kawasan pariwisata, fasilitas pariwisata, dan daya tarik wisatanya. Indonesia terdapat banyak destinasi pariwisata, mulai dari destinasi pariwisata alam, budaya, dan buatan serta Indonesia mempunyai pesona alamnya yang begitu indah, dengan demikian wisatawan dari Luar Negeri ataupun Dalam Negeri berkunjung ke destinasi pariwisata yang ada di seluruh Indonesia.

Sumber daya alam dengan hasil yang melimpah, sebetulnya sangat menjanjikan bagi kelangsungan di sektor kepariwisataan, tetapi pada nyatanya, sektor kepariwisataan masih belum maksimal pengembangannya ketika di lapangan. Destinasi pariwisata harus terus dikembangkan, berkembangnya suatu destinasi pariwisata tidak akan terlepas dari usaha-usaha koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder dalam bidang kepariwisataan.

Perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah akan memberikan manfaat ekonomis terhadap Masyarakat, Bisnis/Industri Pariwisata, dan Pemerintah, dan dapat menjadi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan yang berkunjung, kelestarian lingkungan alamnya, kelestarian adat istiadat masyarakat, dan kelestarian sosial budaya masyarakat. Maka dari itu membutuhkan suatu strategi perencanaan yang matang dan sistematis terhadap pengembangan pariwisata di suatu kawasan pariwisata.

Daerah yang mempunyai tujuan kegiatan pariwisata di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, tepatnya di Kawasan Ciwidey. Berdasarkan data statistik Kabupaten Bandung Dalam Angka 2018, tercatat jumlah tempat wisatanya sebanyak 32 tempat wisata di Kawasan Ciwidey. Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2016-2036, salah satu daerah yang diperuntukkan untuk pariwisata adalah Kawasan Ciwidey.

Kawasan Ciwidey memiliki tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali, dan Kecamatan Pasir Jambu, ketiga Kecamatan tersebut mempunyai obyek wisata yang berbeda-beda. Berikut beberapa obyek wisata yang berada di Kawasan Ciwidey :

TABEL 1 DAFTAR OBYEK WISATA DI KAWASAN CIWIDEY

Kecamatan Ciwidey	Kecamatan Rancabali	Kecamatan Pasir Jambu
Bukit Jamur	Kawah Putih	Barusen Hills
Kebun Petik Strawberry	Situ Patenggang	D'riam Riverside Resort
Desa Wisata Rawabogo	Perkebunan Teh Rancabali	Mushroom Hill Rancabolang Ciwidey
Desa Wisata Lebakmuncang	Kawah Rengganis	Curug Cipanji
Kebun Taman Obat	Air Panas Cimanggu	Bukit Indah Gambung
Taman Kelinci	Air Panas Walini	
Gunung Padang	Glamping Lake Side	
Kolam Renang Valley Ciwidey	Kampung Cai Ranca Upas	

Sumber : RIPPDA Kabupaten Bandung 2018-2025

Merujuk kepada Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPDA) Kabupaten Bandung 2018-2025, memiliki strategi kebijakan kelembagaan, sebagai berikut, “Peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan tata kelola” kemudian “Mengembangkan tata kelola pariwisata daerah Kabupaten pada destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata”.

Demi mewujudkan dari kebijakan tersebut yaitu melakukan pengelolaan secara terstruktur dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan/*stakeholder*. (Abdurrahman, 2014).

Berdasarkan dari Beritelli et al., (2007) tata kelola adalah suatu sistem terhadap hubungan antar *stakeholder* yang bekerja sama satu sama lain. Kemudian seperti apa *stakeholders* untuk merencanakan, melaksanakan serta

evaluasi terhadap hasil yang telah dicapainya. Lalu tata kelola destinasi pariwisata adalah suatu susunan perencanaan dan pelaksanaan yang memudahkan *stakeholders* agar dapat meningkatkan kerja sama, koordinasi/kolaborasi, kepemimpinan, dan tujuan yang sama terhadap destinasi/kawasan pariwisata dengan menggunakan perencanaan secara matang. (Teguh, 2015)

Dari penelitian ini tata kelola destinasi pariwisata di Kawasan Ciwidey yaitu mengenai strategi kebijakan kelembagaan yang mengacu pada RIPPDA Kabupaten Bandung Tahun 2018-2025 serta permasalahan tata kelola yang terjadi di Kawasan Ciwidey, dengan tata kelola destinasi antara pemangku kepentingan/*stakeholders* serta mengacu pada konsep *Destination Management Organization* (DMO) yang dinilai memang ampuh dikarenakan dapat melibatkan *stakeholders* terhadap proses pengembangan pariwisata Kawasan Ciwidey.

Agar bisa melibatkan semua *stakeholder* di Kawasan Ciwidey harus melalui tahapan analisis *stakeholder*. Menurut Blackman (2003:23) terdapat beberapa tahapan, yaitu : 1) Tingkat Ketertarikan *Stakeholder*; 2) Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder*; dan 3) Identifikasi *Stakeholder*, yang mampu meningkatkan partisipasi *stakeholders* di Kawasan Ciwidey.

Kabupaten Bandung khususnya Kawasan Ciwidey, yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan pariwisata memiliki beberapa permasalahan yang terjadi terhadap tata kelola destinasi pariwisata yaitu, 1) minimnya fasilitas penunjang pariwisata seperti ATM, agen bank dan klinik kesehatan; 2) perawatan terhadap infrastruktur masih kurang; 3) kondisi jalan ada beberapa yang berlubang yang akan berakibat celaka bagi masyarakat setempat dan wisatawan yang berkunjung;

4) lebar jalan yang sempit mengakibatkan kemacetan di hari libur; 5) terdapat objek wisata yang belum dikembangkan seperti Kawah Cibuni dan Situ Lembang; 6) minimnya penyediaan transportasi khusus ke beberapa obyek wisata di Kawasan Ciwidey; 7) promosi masih belum efektif di beberapa objek wisata di Kawasan Ciwidey; 8) kondisi kebersihan di Kawasan Ciwidey khususnya di obyek-obyek wisata yang masih kurang; 9) data dan informasi terkait potensi sumber daya kepariwisataan masih belum memadai; 10) pengelolaan terhadap pengembangan pariwisata dari *stakeholder* masih bersifat masing-masing dari segi tugas dan fungsinya.

Dari begitu banyak permasalahan yang terjadi di Kawasan Ciwidey diharapkan mampu mengelola lebih produktif untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan begitu dibutuhkan suatu pengelolaan yang optimal agar setiap *stakeholder* mempunyai tugas, fungsi dan peran yang jelas terhadap pengembangan pariwisata. Dalam rangka mengembangkan segala kegiatan pariwisata di Kawasan Ciwidey, harus dibutuhkan tata kelola yang tepat.

Maka dari itu, manajemen suatu pemangku kepentingan terhadap sebuah kawasan pariwisata menjadi suatu keharusan, bukan hanya semata-mata perencanaannya saja, tetapi pengimplementasian yang diutamakan. Agar suatu tata kelola bisa berkelanjutan secara menyeluruh dari berbagai keterlibatan pemangku kepentingan.

Dari banyaknya destinasi pariwisata di Kawasan Ciwidey yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pariwisata, sumber daya manusia yang terlibat di pariwisata dan sumber daya potensial lainnya yang belum masih dikelola dengan

optimal, maka harus diperlukan suatu format pengelolaan yang benar dan jelas, supaya sumberdaya tersebut bisa berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, tujuan yang diinginkan bisa tercapai yaitu dapat memetakan pemangku kepentingan, mengembangkan suatu sistem koordinasi kelembagaan, menilai tingkat kepentingan, pengaruh, dan keterlibatan pemangku kepentingan terhadap tata kelola destinasi pariwisata agar bisa meningkatkan kontribusi dari masing-masing *stakeholder* di Kawasan Ciwidey.

Sebagai kawasan pariwisata yang memiliki beberapa destinasi pariwisata dan berbagai macam permasalahan aktual dari sektor pariwisata yang terjadi di Kawasan Ciwidey Kabupaten Bandung. Tata kelola destinasi pariwisata sangatlah penting antara pemangku kepentingan/*stakeholder* yang harus diatur dengan hasil yang efektif supaya dapat dimanfaatkan dengan optimal serta berkelanjutan sesuai strategi kebijakan kelembagaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Maka dari itu, penelitian ini mengenai **“Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Ciwidey Kabupaten Bandung”**

B. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, berbagai kebijakan mengenai kelembagaan yang tercantum dalam RIPPDA Kabupaten Bandung Tahun 2018-2025 yang memang diperuntukkan untuk mengembangkan tata kelola destinasi pariwisata serta meningkatkan koordinasi dan keterlibatan stakeholder di Kawasan Pariwisata. Penulis mengajukan rumusan masalah di penelitian ini, antara lain :

- a. Identifikasi stakeholder yang terkait dengan pariwisata
 - b. Koordinasi dan keterlibatan stakeholder dengan pariwisata
 - c. Bagaimana pengaruh dan kepentingan stakeholder terhadap tata kelola destinasi pariwisata
2. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi di Kecamatan Rancabali saja dikarenakan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung tahun 2019 menjelaskan sebanyak 35% obyek wisata di Kabupaten Bandung terletak di Kecamatan Rancabali, dan kebanyakan wisatawan yang datang ke Ciwidey yaitu ke Kecamatan Rancabali.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Formal

Sebagai syarat untuk memenuhi tugas Proyek Akhir di Semester 8 (delapan) pada Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata, Jurusan Kepariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung.

2. Tujuan Operasional

Bertujuan untuk memiliki tata kelola destinasi pariwisata antar pemangku kepentingan/*stakeholder* dengan hasil yang baik, terstruktur, terkoordinasi dan matang di Kawasan Rancabali Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menyalurkan keilmuan terkait tata kelola destinasi pariwisata antara stakeholder untuk seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Pariwisata

NHI Bandung dan diharapkan tulisan ini menjadi manfaat bagi pembaca untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Menjadi acuan untuk meningkatkan koordinasi dan keterlibatan antar *stakeholder* terhadap pengembangan tata kelola destinasi pariwisata di Kawasan Rancabali.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.